

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kedua paling rawan terkena bencana dari 193 negara di dunia (Databoks, 2023). Rawannya bencana di Indonesia disebabkan oleh letaknya secara geografis yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik (bnpb.go.id). Selain ancaman dari lautan, daratan Indonesia bagian Selatan dan timur Indonesia juga terdapat sabuk vulkanik yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi. Dengan itu, wilayah Indonesia sangat berpotensi mengalami berbagai bencana, di antaranya letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, hingga tanah longsor, sehingga disebut dengan negara “*ring of fire*” (Reid, 2015).

Pada tahun 2023, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa terdapat 5.400 kejadian bencana yang terjadi di Indonesia, termasuk di antaranya kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang pasang dan abrasi, gempabumi, dan letusan gunung api (BNPB, 2024). Dampak akibat dari bencana tersebut juga beragam, termasuk di antaranya korban jiwa dan terkena luka-luka, kerusakan pada rumah, fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, dan fasilitas kesehatan. .

United Nation International Strategy for Disaster Reduction (UN-IDSR) mendefinisikan bencana sebagai gangguan serius terhadap fungsi suatu komunitas atau masyarakat yang menyebabkan kerugian pada manusia, material, ekonomi,

atau lingkungan yang melebihi kemampuan komunitas untuk mengatasinya menggunakan sumber dayanya sendiri (Makwana, 2019). Selain dari kerugian materi dan fisik, bencana yang menimpa pada suatu masyarakat juga memiliki dampak negatif terhadap kesehatan psikologis. Bencana biasanya terjadi tiba-tiba tanpa peringatan, sehingga membuat para korban terkejut dan terguncang.

Permasalahan psikologis yang biasa terjadi pada korban bencana adalah ketidakstabilan emosi, reaksi stres, kecemasan, dan juga trauma (Makwana, 2019). Korban bencana alam juga dapat mengalami gangguan penggunaan alkohol, kemarahan, ketakutan, ketidakpastian, dan ketidakpercayaan (Esterwood & Saeed, 2020). Selain itu, permasalahan psikologis yang terjadi pada korban bencana juga dapat memicu terjadinya gangguan dalam jangka waktu panjang, seperti *post-traumatic stress disorder* (PTSD) dan depresi (Beaglehole dkk., 2018). Permasalahan psikologis yang dialami oleh korban dapat dipicu karena tidak adanya antisipasi dan kesadaran terhadap kemungkinan respons psikologis dalam situasi penuh tekanan dan ketidakpastian.

Berbagai dampak yang ditimbulkan oleh bencana dapat diminimalisir dengan adanya mitigasi bencana yang baik. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu mitigasi fisik dan nonfisik. Mitigasi fisik melibatkan tindakan langsung untuk mengurangi risiko bencana melalui pendekatan berbasis infrastruktur, sementara mitigasi

nonfisik dilakukan melalui upaya yang bersifat edukatif, seperti pendidikan mengenai mitigasi bencana (Nurjanah & Mursalin, 2022).

Mitigasi nonfisik, seperti edukasi mitigasi bencana memiliki peran dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat (Genika dkk., 2023). Secara umum, kesiapsiagaan bencana diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu kesiapsiagaan materi yang mencakup pengamanan barang-barang rumah dan persiapan logistik, kegiatan perencanaan yang meliputi pengaturan tempat aman, dan pengetahuan serta kemampuan terkait bencana itu sendiri (Malkina-Pykh & Pykh, 2013). Namun, selain ketiga aspek tersebut, terdapat *psychological preparedness* yang seringkali diabaikan (Zulch, 2019).

Psychological preparedness merupakan keadaan intra-individual yang mencakup kesadaran, kemampuan mengantisipasi keadaan darurat, dan kesiapan psikologis untuk mengelola respons dalam situasi tak terduga (Malkina-Pykh & Pykh, 2013). *Psychological preparedness* dapat membantu individu dalam mengatasi bahaya dalam masa periode peringatan, keadaan nyaris celaka, dan dampak bahaya setelahnya (Boylan & Lawrence, 2020). *Psychological preparedness* meliputi kesiapsiagaan dalam diri individu yang terlihat dari pengetahuan, kesadaran, efikasi diri, serta keinginan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana. Selanjutnya, *psychological preparedness* juga mencakup hubungan individu dengan orang di sekitarnya dan hubungan dengan institusi yang berwenang dalam tanggap bencana di wilayah setempat (Pertiwi, dkk., 2024).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, *psychological preparedness* masyarakat Indonesia masih rendah, termasuk pada masyarakat di wilayah rawan bencana. Fauni & Diana (2021) mengungkapkan bahwa 86.5% dari masyarakat yang tinggal di wilayah bencana memiliki tingkat *psychological preparedness* yang sedang dan rendah. Selanjutnya, (Jamali dkk., 2022) melihat bahwa sebagian besar masyarakat di daerah rawan banjir berada dalam rentang kategori sedang. Roudini, dkk. (2017) berdasarkan kajian literaturinya menemukan terdapat kurangnya *psychological preparedness* di sebagian besar negara.

Situasi ini terlihat di Nagari Koto Tuo yang merupakan daerah terdampak galodo yang melanda beberapa wilayah di Sumatera Barat pada tanggal 11 Mei 2024 (Siri, 2024). Meskipun tidak ada korban jiwa, galodo ini mengakibatkan kerusakan besar, termasuk menghancurkan satu sekolah dasar (SD) dan beberapa rumah warga yang menyebabkan kerugian materi. Selanjutnya, risiko terjadinya galodo susulan masih tetap ada. Hal ini diketahui berdasarkan kajian yang dilakukan oleh tenaga ahli Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA), yang mengidentifikasi potensi aliran debris dengan kandungan sedimen tinggi di beberapa titik di sekitar Gunung Singgalang (Primananda, 2024). Hampan material galodo di lereng Gunung Singgalang terpantau berada sekitar tiga kilometer di atas permukiman penduduk, yang dapat mengancam keselamatan apabila curah hujan tinggi (Fauzi, 2024).

Selain risiko bencana galodo, Nagari Koto Tuo yang berada di Kabupaten Agam juga menghadapi ancaman bencana alam lainnya, seperti gempa bumi, letusan Gunung Merapi, kebakaran hutan, tanah longsor, kekeringan, serta cuaca

ekstrem. Menurut Buku Indeks Risiko Bencana (IRBI) tahun 2023, Kabupaten Agam menempati peringkat ke-8 dari 514 kabupaten di Indonesia dalam kategori risiko tinggi bencana, sekaligus menjadi kabupaten dengan tingkat risiko bencana tertinggi di Sumatera Barat (*Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023, 2024*).

Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti kepada korban bencana galodo di Nagari Koto Tuo, 70% dari 39 orang mengaku mengalami perubahan emosi, seperti merasa was-was, mudah marah, mudah tersinggung, dan kekhawatiran berlebih. Mereka juga mengalami peningkatan pada stres dan kecemasan yang tinggi. Selain itu, ketika bencana terjadi, penduduk masih belum mengetahui terkait jalur evakuasi yang aman dan tempat berlindung sementara saat bencana galodo terjadi. Mereka merasa sangat panik dan berlindung ke tempat yang tidak aman. Selanjutnya, 10 dari 11 orang masyarakat tidak memiliki tabungan darurat yang dapat digunakan saat darurat bencana.

Masyarakat Nagari Koto Tuo juga memiliki keterikatan yang kuat dengan rumah dan lingkungan tempat mereka tinggal. Beberapa masyarakat juga ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan risiko mitigasi bencana, seperti Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang memang ditugaskan sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi masyarakat dalam mengantisipasi kejadian bencana dan mengurangi risiko bencana. KSB bersama pemerintah Nagari Koto Tuo telah melakukan berbagai kegiatan, tetapi partisipasi aktif masyarakat masih terbatas.

Berdasarkan studi literatur, hal yang sama juga terlihat dari sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana di Indonesia. Masyarakat mengalami gangguan kecemasan akan ancaman dampak yang mungkin terjadi

akibat bencana (Devi & Hermawati, 2024; Lamba, dkk., 2017). Masyarakat juga ditemukan belum memiliki pengetahuan yang baik terkait bahaya alam yang sewaktu-waktu dapat mengancam mereka dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut (Prayitno, dkk., 2021; Hildayanto, 2020; Yusuf & Mangile, 2019). Mereka belum mengetahui adanya papan jalur evakuasi bencana (Khasanah dkk., 2024). Pengetahuan yang rendah pada masyarakat berdampak pada kesulitan dalam implementasi upaya penanggulangan bencana (Dewi dkk., 2024).

Selain pengetahuan yang masih belum baik, partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana juga masih tergolong rendah, terutama dalam kegiatan simulasi bencana dan program evakuasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana alam (Cahyadi dkk., 2024). Pada daerah rawan banjir di Jayapura, hanya sekitar 37% masyarakat yang berpartisipasi dalam penyuluhan yang diselenggarakan untuk penanggulangan banjir bandang yang menunjukkan masih terbatasnya kesadaran dan keterlibatan warga dalam menghadapi risiko bencana (Safkaur dkk., 2024). Keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana sangat penting, karena kegiatan seperti simulasi dan edukasi evakuasi dapat membantu mereka mengenali langkah-langkah penting yang perlu diambil saat menghadapi bencana.

Kemudian, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sebagian besar ditemukan belum memiliki persiapan tabungan yang dapat digunakan dalam keadaan darurat apabila bencana terjadi (Khasanah, dkk., 2024; Mayzarah & Batmomolin, 2021; Nurhadi, dkk., 2018). Tabungan ini memiliki peran penting

sebagai strategi penghidupan yang memungkinkan keluarga untuk lebih tangguh dan meminimalkan dampak negatif finansial.

Selain persiapan pada masing-masing individu, upaya mitigasi bencana juga harus dilakukan secara kolektif antar masyarakat dan institusi atau lembaga yang berwenang di daerah tersebut. Namun, terdapat ketidakpercayaan pada masyarakat kepada manajemen tanggap bencana, seperti dalam bentuk sistem peringatan dini (Cahyadi dkk., 2024). Selain itu, masyarakat juga masih banyak yang lebih mempercayai informasi tradisional dibandingkan dengan informasi modern seperti anjuran dari pemerintah terkait bencana alam yang terjadi (Wardyaningrum, 2018). Hal ini akan berpengaruh apabila terjadinya situasi darurat dengan menghalangi upaya mitigasi bencana.

Pengetahuan terkait bencana, partisipasi masyarakat, persiapan individu termasuk memiliki tabungan darurat, serta kerja sama antar masyarakat dan kepercayaan kepada institusi berwenang termasuk ke dalam aspek-aspek *psychological preparedness* (Pertwi dkk., 2024) *Psychological preparedness* penting untuk dimiliki individu, terutama masyarakat di wilayah rawan bencana karena tingkat *psychological preparedness* individu dalam menghadapi bencana mempengaruhi keberhasilan upaya tanggap darurat dan pemulihan (Suhaimi, 2016). Kesiapsiagaan psikologis yang dimiliki oleh individu akan terlihat, baik kondisi pre-bencana, saat bencana, hingga pasca-bencana.

Saat situasi sebelum bencana, individu yang memiliki *psychological preparedness* melakukan perencanaan secara proaktif dalam upaya antisipasi dan memahami dengan baik konteks risiko yang mungkin dihadapi (Boylan &

Lawrence, 2020). Selain itu, mereka juga memiliki kesiapan material yang diperlukan dalam menghadapi situasi darurat (Roudini dkk., 2017). Kesiapsiagaan psikologis berhubungan dengan kesiapsiagaan materi, sehingga orang dengan *psychological preparedness* yang baik juga memiliki persiapan materi yang baik dalam menghadapi bencana (Every dkk., 2019).

Pada saat terjadinya bencana, individu yang memiliki *psychological preparedness* yang baik mampu mengelola stres secara efektif (Roudini dkk., 2017) dan mengendalikan emosi (Zulch, 2019). Mereka tetap bisa bersikap tenang, terkendali, dan mampu memberikan dukungan penting kepada anggota keluarga, serta orang lain yang mungkin kurang siap (Malkina-Pykh & Pykh, 2013). Kesiapsiagaan psikologis memungkinkan mereka untuk berpikir jernih dalam situasi yang penuh tekanan, sehingga dapat membantu individu untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan mengurangi risiko bahaya.

Selanjutnya, pada situasi pasca-bencana, individu dengan *psychological preparedness* yang baik dapat secara efektif mengelola mekanisme koping mereka (Boylan & Lawrence, 2020) dan menggunakan strategi koping adaptif untuk menghadapi dampak bencana yang ditimbulkan (Morrissey & Reser, 2003). Mereka cenderung mengalami masalah kesehatan mental yang lebih rendah setelah bencana (Roudini dkk., 2017), serta mampu mengurangi stres psikologis yang dialami (Zulch, 2019). Tingkat kesiapan psikologis individu dalam menghadapi bencana dapat sangat mempengaruhi keberhasilan upaya tanggap darurat dan pemulihan (Suhaimi, 2016). Pada akhirnya, kesiapsiagaan ini membantu mereka dalam menurunkan dampak psikologis dari bencana yang terjadi dan

memungkinkan pemulihan yang lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki *psychological preparedness* yang baik.

Sejauh ini, penelitian tentang *psychological preparedness* masyarakat di wilayah rawan bencana di Indonesia belum banyak dilakukan dan masih sangat terbatas (Palupi, 2021). Salah satu penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian Fauni & Diana (2020) yang melihat pengaruh *self-efficacy* dan religiusitas pada *psychological preparedness* masyarakat di wilayah rawan bencana. Selanjutnya, (Almutmainna dkk., 2023) melakukan penelitian untuk melihat peningkatan pada *psychological preparedness* masyarakat di daerah rawan bencana banjir setelah diberikan psikoedukasi terkait *psychological preparedness*. Penelitian mengenai gambaran *psychological preparedness* di wilayah rawan bencana galodo belum pernah dilakukan. Selain itu, penelitian yang telah dilakukan tidak menggunakan alat ukur yang dikembangkan berdasarkan konteks budaya Indonesia.

Berdasarkan hasil survey lapangan dan fenomena literatur yang menjelaskan bahwa tingkat *psychological preparedness* pada masyarakat daerah rawan bencana yang masih kurang, serta melihat potensi dan risiko bencana alam di wilayah Nagari Koto Tuo yang memerlukan *psychological preparedness* untuk menghadapinya, peneliti tertarik untuk melihat lebih lanjut terkait gambaran *psychological preparedness* pada masyarakat Nagari Koto Tuo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Seperti apa gambaran *psychological preparedness* dalam menghadapi bencana alam pada masyarakat di Nagari Koto Tuo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran *psychological preparedness* dalam menghadapi bencana alam pada masyarakat di Nagari Koto Tuo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang psikologi, khususnya psikologi bencana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin dicapai melalui penelitian ini terhadap beberapa pihak, di antaranya:

1. Penduduk Nagari Koto Tuo

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran *psychological preparedness* dalam menghadapi bencana alam pada masyarakat di Nagari Koto Tuo, sehingga dapat menambah pengetahuan masyarakat untuk siap siaga.

2. Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah dalam memberikan penanganan yang baik kepada masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.